

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO

Khodziah Isnaini Kholif, Irwan Noor, Siswidiyanto

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: olivenn7@gmail.com

Abstract: *The Implementation of Program Keluarga Harapan (PKH) In Eradicate Poverty In Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. This research was conducted on the basis of the presence of poverty in Indonesia, especially in Mojokerto. In an effort to overcome poverty, the government has a wide range of integrated poverty reduction programs. One of the programs is PKH. The purpose of the research is to analyze how the implementation of PKH and factors faced PKH in eradicate poverty. The research method uses descriptive qualitative research approach. The results showed implementation PKH in subdistrict Dawarblandong not succeeded. Not all of the contents of the policy in the PKH implemented well. The purpose of PKH is also yet to get maximum results. The persistence of the poverty, poor nutrition, mother died giving birth, and low public support to increased welfare. Suggestions that can be implemented namely evaluate the policies and giving awards to individuals.*

Keywords: *implementation of policy, Program Keluarga Harapan (PKH), poverty reduction programs*

Abstract: **Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.** Penelitian ini dilakukan atas dasar terdapatnya kemiskinan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Mojokerto. Sebagai upaya mengatasi kemiskinan, pemerintah memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Salah satu program itu adalah PKH. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi PKH dan faktor yang dihadapi PKH dalam menanggulangi kemiskinan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi PKH di Kecamatan Dawarblandong belum berhasil. Tidak semua isi kebijakan PKH dilaksanakan dengan sesuai. Tujuan PKH juga belum mendapatkan hasil yang maksimal. Masih adanya kemiskinan, gizi buruk, ibu meninggal karena melahirkan, serta rendahnya masyarakat yang mendukung peningkatan kesejahteraan. Saran yang dapat dilaksanakan yakni mengevaluasi kebijakan serta pemberian penghargaan kepada perseorangan.

Kata kunci: implementasi kebijakan, Program Keluarga Harapan (PKH), program penanggulangan kemiskinan

Pendahuluan

Kemiskinan adalah permasalahan pokok yang dialami oleh sebagian besar negara di dunia. Walaupun tidak dikatakan seluruhnya, dengan berbeda-beda tingkat dan jumlah orang miskin pada setiap negara, hampir tidak ada satu negara yang dapat terbebas dari masalah kemiskinan. Negara kaya dan maju di bidang sains dan industri juga mengalami kemiskinan meski jumlahnya tidak besar. Kemiskinan merupakan masalah umum dan telah menjadi ancaman serta bencana bagi suatu negara.

Dunia mengalami kemajuan teknologi di setiap zamannya, berlangsungnya kebangkitan dan meluasnya penggunaan alat dalam industri

namun kemiskinan masih menjadi beban yang harus diurus oleh pemerintah. Kemiskinan juga dialami oleh negara yang memiliki banyak sumber daya alam yakni Indonesia.

Pemerintah Indonesia saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Program tersebut salah satunya PKH (Program Keluarga Harapan), PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan di bidang pendidikan dan kesehatan.

Ada banyak daerah di Indonesia yang menerima bantuan PKH, salah satunya, adalah Kabupaten Mojokerto. Pada tahun 2007 penerima bantuan PKH di Kabupaten Mojokerto ada 10 kecamatan yakni Sooko, Jatiarjo, Gondang, Trowulan, Dawarblandong, Pacet, Mojoanyar, Gedeg, Ngoro, dan Trawas. Pada tahun 2008 penerima bantuan bertambah 4 kecamatan yakni Mojosari, Bangsal, Punggong dan Puri. Sedangkan Kecamatan Dlanggu, Kutorejo, Kemlagi dan Jetis menerima bantuan PKH pada tahun 2009. Kecamatan Dawarblandong adalah kecamatan yang memperoleh bantuan PKH terbanyak di Kabupaten Mojokerto yakni 1585 RTSM pada tahap tiga tahun 2013 (UPPKH Kabupaten Mojokerto). Maka penulis merumuskan masalah Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Apa saja faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PKH. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implementasi PKH dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PKH. Kontribusi penelitian bagi pemerintah pusat dan daerah sebagai referensi dalam rangka memberdayakan masyarakat serta memberikan informasi bagi pembaca dan penulis lain sebagai inspirasi untuk dikembangkan ke topik lain.

Tinjauan Pustaka

1. Administrasi Publik

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano, sebagaimana dikutip Keban (2004, h.3), mengatakan administrasi publik adalah “proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, melaksanakan, dan mengelola keputusan dalam sebuah kebijakan publik”. Roosenbloom yang dikutip Pasolong (2010, h.8), mendefinisikan administrasi publik merupakan “pemanfaatan teori dan proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislatif, eksekutif, dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian”.

Ruang lingkup administrasi publik adalah hal-hal yang dibahas atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam lingkup administrasi publik. Menurut Keban (2004, h.11) ruang lingkup suatu administrasi publik meliputi dimensi-dimensi strategis, yaitu dimensi kebijakan, dimensi organisasi, dimensi

manajemen, dimensi moral dan etika, dimensi lingkungan, dimensi akuntabilitas kinerja.

Peran administrasi publik dijelaskan oleh Gray, sebagaimana dikutip Pasolong (2010) yakni: Administrasi publik berperan menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional, dapat melindungi hak-hak masyarakat, dan berperan dalam melestarikan nilai-nilai tradisi masyarakat.

2. Kebijakan Publik

Dunn, sebagaimana dikutip Pasolong (2010, h.39), mengatakan kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Menurut Thomas R Dye sebagaimana dikutip Pasolong (2010, h.39), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Dye mengatakan bahwa pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Jenis-jenis kebijakan publik menurut Nugroho (2006) dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kebijakan yang bersifat makro, kebijakan yang bersifat meso, kebijakan yang bersifat mikro. Proses kebijakan publik menurut Subarsono (2005, h.8), adalah “serangkaian intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut mulai dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan”.

3. Implementasi Kebijakan

“Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”(Winarno, 2002, h.102). Model-model Implementasi menurut Parsons (2006, h.464-492) secara garis besar model implementasi kebijakan dapat dibagi menjadi empat yakni model analisis kegagalan, model rasional (*top-down*), model *bottom-up*, model teori *hybrid*. Faktor Pendukung Implementasi menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III yang dikutip oleh Winarno (2002), yakni komunikasi, Sumber-sumber, kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku dan

struktur birokrasi. Sedangkan faktor penghambat implementasi menurut Sunggono (1994) implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu isi kebijakan, informasi, dukungan, pembagian potensi

4. Kebijakan Kemiskinan

Kebijakan kemiskinan adalah suatu usaha pengambilan keputusan dalam hal kemiskinan mulai dari menentukan target dengan menggunakan indikator, penanganan, dan penanggulangan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dalam menangani dan menanggulangi kemiskinan harus mengerti betul tentang kemiskinan dan indikator yang akan digunakan. Kajian tentang pemahaman kemiskinan yang hakiki dan komprehensif sangat diperlukan untuk memahami dan mencari penjelasan agar tidak terjadi salah urus ketika menanggulangnya. Suparlan (1984, h.12) secara singkat menjelaskan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Kemiskinan berdasarkan penyebabnya menurut Baswir (1997) terbagi menjadi tiga yakni kemiskinan kultural, kemiskinan struktural, kemiskinan natural. Penanggulangan kemiskinan dalam Peraturan presiden no. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

5. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada RTSM. Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang terkait dengan

upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan umum PKH adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan (Departemen Sosial RI, 2009).

Kewajiban penerima PKH, berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan. RTSM yang sudah ditetapkan menjadi peserta PKH dan memiliki kartu PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan. Persyaratan seperti mengontrol kandungan ibu hamil, menimbang dan memberi vitamin kepada balita. Adapun peserta PKH yang dikenakan persyaratan kesehatan adalah RTSM yang memiliki ibu hamil, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD. Berkaitan dengan pendidikan, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan jika memiliki anak berusia 7-15 tahun. Anak peserta PKH tersebut harus didaftarkan pada satuan pendidikan setara SD dan SMP dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85 persen dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.

Pembayaran bantuan dilakukan empat kali atau empat tahap dalam satu tahun. Bantuan tetap yang diberikan kepada peserta PKH adalah Rp. 200.000,-. Jika peserta memiliki anak usia di bawah 6 tahun dan ibu hamil/menyusui maka bantuan akan ditambah Rp. 800.000,-. Bertambah Rp. 400.000,- jika memiliki anak peserta pendidikan setara SD/MI. Bertambah lagi Rp. 800.000,- jika peserta memiliki anak peserta pendidikan setara SMP/MTs. Penerima bantuan atau peserta PKH tentu akan menerima jumlah uang yang berbeda-beda sesuai dengan anggota keluarga yang dimilikinya. Namun jika peserta tidak memenuhi komitmen yang telah ditentukan dalam tiga bulan maka besaran bantuan yang diterima akan berkurang Rp.50.000 untuk bulan pertama, berkurang Rp. 100.000 pada bulan kedua dan pada bulan ketiga berkurang Rp. 150.000 apabila masih tidak memenuhi komitmen. Jika dalam tiga bulan berturut-turut masih tidak memenuhi komitmen maka akan dikeluarkan dari kepesertaan (Departemen Sosial RI, 2009).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2009,

h.1) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Fokus dalam penelitian ini adalah

- (1) Implementasi Program Keluarga Harapan dalam menanggulangi kemiskinan
 - a) kesesuaian dasar regulasi/isi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan pelaksanaan PKH di lapangan.
 - b) kesesuaian capaian rencana/tujuan PKH dengan pelaksanaannya di lapangan.
 - c) aktor-aktor pelaksana yang membantu implementasi PKH.
 - d) anggaran atau biaya yang digunakan dalam implementasi PKH.
- (2) Faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Lokasi tempat penelitian berada di Kabupaten Mojokerto dan situs yang diambil dalam penelitian ini adalah pada Kecamatan Dawarblandong. Sumber data diperoleh dari informan, dokumen dan observasi. Dalam mengumpulkan data-data penelitian, terdapat 3 (tiga) proses kegiatan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu: 1) Proses memasuki lokasi penelitian, 2) ketika berada di lokasi penelitian melakukan perkenalan, 3) mengumpulkan data (observasi, wawancara dan dokumentasi). Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri dengan menggunakan alat bantu seperti pedoman wawancara, perekam suara atau kamera. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman yang diterjemahkan Tjetjep (1992, h.16) analisis yang digunakan adalah dengan cara melakukan proses penelitian secara bertahap dan interaktif pada data yang telah ditentukan.

Pembahasan

1. Implementasi Program Keluarga Harapan dalam menanggulangi kemiskinan

Dunn, sebagaimana dikutip Pasolong (2010), mengatakan kebijakan publik adalah sebuah pilihan yang dibuat oleh pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Dalam mata kebijakan publik, adanya Program Keluarga Harapan ini terjadi karena adanya permasalahan kemiskinan di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Mojokerto. Namun

ketika ada permasalahan yang terjadi setelah pelaksanaan ini berjalan tetapi tidak disebutkan solusinya pada kebijakan maka para pelaksana berkoordinasi untuk membuat kebijakan bersama-sama untuk mengatasi masalah tersebut. Di Kecamatan Dawarblandong misalnya kartu PKH yang digunakan sebagai identitas penerima bantuan PKH ternyata sebagian masyarakat pernah menghilangkannya. Untuk mempermudah masalah ini maka pendamping memberi kebijakan dengan mengumpulkan kartu PKH namun jika dibutuhkan bisa kapan saja diambil dan digunakan.

Proses kebijakan memang membutuhkan berbagai kegiatan mulai dari penentuan kebijakan mana yang akan diambil, kebijakan bisa dari mengadopsi kebijakan yang pernah dilakukan sebelumnya atau membuat kebijakan yang benar-benar baru. Setelah pembuatan kebijakan kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut dan akhirnya kebijakan dievaluasi. Di Kecamatan Dawarblandong pada pelaksanaan PKH juga terlihat proses kebijakan seperti ada kebijakan dan implementasi namun pada poin evaluasi masih ada kebijakan yang belum dievaluasi.

Dalam implementasinya, pelaksanaan sebuah kebijakan adalah perencanaan yang dipraktikkan. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini juga dilakukan agar tujuan dari sebuah kebijakan dapat terlaksana dengan menggunakan sarana-sarana dengan waktu tertentu. Pelaksanaan PKH juga menggunakan sarana-sarana yang ada seperti sekolah SD dan SMP serta Puskesmas maupun Rumah Sakit sebagai penunjang pelaksanaannya. Waktu pertama kali terlaksana PKH adalah pada tahun 2007/2008 dan masih terlaksana sampai sekarang. Pelaksanaan PKH ini dilaksanakan untuk memenuhi tujuannya yakni mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM baik di bidang pendidikan maupun kesehatan.

Adanya evaluasi kebijakan, digunakan untuk memberikan penilaian kepada pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan PKH diharapkan dapat berjalan dengan baik dengan adanya evaluasi kebijakan. Di Kecamatan Dawarblandong ada permasalahan yang belum dievaluasi yakni kebijakan mengenai *double job*. Adanya pendamping yang memiliki pekerjaan lain selain pendamping namun tidak ada sanksi sedangkan UPPKH kabupaten mengetahui dengan jelas permasalahan ini. Permasalahan ini terjadi karena adanya aturan yang melarang adanya tuntutan menjadi CPNS. Selain itu ketidakjelasan kontrak juga menjadikan pendamping memilih tetap melanggar kebijakan ini. Kebijakan *double job* ini menjadi sia-sia karena sanksi yang sudah

ada tidak diberikan, begitu juga dengan atasan yang sudah mengetahui permasalahan *double job* tetapi evaluasi kebijakan belum dilaksanakan pada kasus tersebut.

Tabel 1 Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto

Tahun	Penduduk	Masyarakat miskin	%
2009	1.070.579	40.709	3,8
2010	1.088.632	39.087	3,6
2011	1.112.821	39.075	3,5
2012	1.143.747	25.502	2,2
2013	1.162.630	42.714	3,7

Sumber: data diolah peneliti 2014

Tabel 2 Gizi buruk di Kec Dawarblandong dan Kab Mojokerto

	Jumlah balita *)	Jumlah balita **)	Gizi buruk *)	Gizi buruk **)
2008	3.053	69.684	6	753
2009	2.928	66.453	1	100
2010	3.223	65.709	2	102
2011	3.507	68.437	9	209
2012	3.540	69.157	7	103

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto 2014

*) Jumlah balita yang diukur dan gizi buruk di Kecamatan Dawarblandong

**) Jumlah balita yang diukur dan gizi buruk di Kabupaten Mojokerto

Tabel 3 Jumlah Kematian Ibu dan Bayi Kabupaten Mojokerto

Tahun	Jml persalinan	Jumlah kematian ibu	Jml kematian bayi
2007	16.497	17	101
2008	16.776	18	113
2009	17.229	12	109
2010	17.433	17	138
2011	16.806	16	201
2012	16.258	19	178
2013	16.391	22	129

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto 2014

Tujuan umum PKH adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Secara khusus tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) terdiri:

a) Meningkatkan status sosial ekonomi RTSM.

b) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar dari RTSM.

c) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTSM.

d) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM (Departemen Sosial RI, 2009).

Dari capaian rencana/tujuan yang sudah tersusun baik tersebut masih belum mendapatkan hasil yang maksimal. Masih banyaknya balita yang kekurangan gizi, masih adanya ibu yang meninggal karena melahirkan, akses dan kualitas kesehatan dan pendidikan masih rendah menjadi penyebab hasil belum maksimal. Tujuan hanya akan tercapai jika pelaksanaannya dilakukan dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin dengan menekan adanya hambatan maupun kendala yang akan terjadi.

Dalam pelaksanaan suatu program yang lebih utama adalah adanya rasa semangat dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan program. Setiap aktor pelaksana harus dibekali dan harus memiliki semangat serta komitmen yang tinggi. Tingginya semangat dan komitmen dari aktor pelaksana program tentu akan menimbulkan rasa ingin memberikan yang terbaik agar memperoleh hasil yang terbaik. Dengan begitu kendala-kendala yang ada dalam sebuah pelaksanaan tentu bukan menjadi persoalan yang besar. Para pelaksana yang berkomitmen tentu akan berusaha agar kendala-kendala terjadi sekecil mungkin bahkan tidak ada sama sekali.

2. Faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan tentu ada kendala yang akan dihadapi baik kendala yang bersifat kecil maupun besar. Berikut faktor penghambat implementasi menurut Sunggono (1994):

a) Isi kebijakan

Isi kebijakan harus jelas dan memiliki tujuan. Dalam isi kebijakan, kekurangan sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia juga dapat menghambat implementasi. Pelaksanaan di lapangan menunjukkan sudah terdapat isi kebijakan dan memiliki tujuan namun pada bagian sumber daya masih ada beberapa kekurangan yang juga menjadi kendala program ini seperti biaya, waktu dan fasilitas.

b) Informasi

Jika Informasi ini tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi maka implementasi juga akan terhambat. Seperti yang dijelaskan Pak Budi selaku pendamping bahwa para pendamping sudah memberikan informasi kepada peserta PKH. Informasi yang diberikan mengenai jadwal yang mana peserta PKH setiap desa akan mengambil bantuan berupa uang tunai sesuai jam yang sudah ditentukan dalam jadwal. Namun informasi yang sudah diberikan kepada peserta tidak didengarkan dengan baik sehingga waktu pengambilan bantuan peneliti melihat adanya peserta yang banyak berkumpul menjadi satu walaupun belum waktunya datang mereka tetap memilih datang pagi. Dengan keadaan yang penuh sesak dan berisik pemanggilan nama yang akan mendapat bantuan sedikit terganggu.

c) Dukungan

Tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan akan mempersulit pelaksanaan kebijakan. Ini juga telah disampaikan oleh Pak Sucipto selaku koordinator pendamping dan pendamping lainnya.

d) Pembagian Potensi

Masalah-masalah akan terjadi apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. Pembagian tugas sudah jelas tetapi

kurangnya rasa tanggung jawablah yang menjadikan kendala. UPPKH kabupaten belum menunjukkan sikap tegas dengan adanya pelanggaran seperti *double job*. Pendamping juga masih belum memberikan sosialisasi yang merata kepada masyarakat agar tidak ada kesalahpahaman dan membuat masyarakat ingin protes.

Kesimpulan

Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto belum berhasil. Tidak semua isi kebijakan PKH dilaksanakan dengan sesuai. Adanya pelanggaran pendamping yang mempunyai pekerjaan lain (*double job*) selain pendamping dan masih adanya masyarakat yang protes. Adanya protes dari masyarakat ini menunjukkan pelaksanaan PKH tidak berhasil memberikan arahan maupun bimbingan kepada masyarakat untuk berusaha menjadi masyarakat yang mandiri tanpa adanya ketergantungan pada pemerintah. Tujuan dari pelaksanaan PKH juga belum mendapatkan hasil yang maksimal. Masih adanya kemiskinan, gizi buruk dan ibu meninggal karena melahirkan, serta masih rendahnya masyarakat yang mendukung peningkatan kesejahteraan. Saran yang dapat dilaksanakan yakni menambah biaya operasional dan memperbaiki fasilitas, sanksi harus dilaksanakan, menambah pegawai dengan perekrutan yang baik, mengevaluasi kebijakan serta pemberian penghargaan kepada perseorangan.

Daftar Pustaka

- Baswir, Revrison. (1997) **Agenda Ekonomi Kerakyatan**. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Departemen Sosial Republik Indonesia. (2009) **Pedoman Umum PKH**. Jakarta.
- Keban, Yeremias T. (2004) **Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu**. Jakarta, Gava Media.
- Miles, dan Huberman. (1992) **Analisis Data Kualitatif**. Dialih bahasakan oleh Tjetjep Rohendri Rohidi. Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. (2006) **Kebijakan Publik: Untuk Negara-Negara Berkembang**. Jakarta, Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Parsons, Wayne. (2006) **Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan**. Dialih bahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta, Kencana.
- Pasolong, Harbani. (2010) **Teori Administrasi Publik**. Jakarta, Alfabeta.
- Peraturan Presiden No.15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (c.1)** Jakarta, Presiden Republik Indonesia.
- Subarsono, AG. (2005) **Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi**. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sugiyono (2009) **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**. Bandung: Alfabet.
- Sunggono, Bambang. (1994) **Hukum dan Kebijaksanaan Publik**. Jakarta, Sinar Grafika.
- Suparlan, Parsudi. (1984) **Kemiskinan di Perkotaan**. Jakarta, Sinar Harapan dan Yayasan Obor Indonesia.
- Winarno, Budi. (2002) **Teori dan Proses Kebijakan Publik**. Yogyakarta, Media Pressindo.